



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/12 /431.013/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor8);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Daftar Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU**, untuk :
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI SITUBONDO,

ttd.
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala SKPD Kabupaten Situbondo yang bersangkutan;
4. Sdr. Pimpinan Bank yang Bersangkutan;
5. Sdr. Bendahara Penerimaan yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 2 Januari 2026
Nomor : 100.3.3.2/12/431.013/2026

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	SKPD	NAMA/NIP.
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BUDIYONO NIP. 198105519 201001 1 004
2.	Dinas Kesehatan	IMAM WAHYUDI, S.E. NIP. 19731216 200903 1 001
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	NURWASIS NIP. 19760202 200701 1 015
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	VIVI NOVIANTI NIP. 1980118 201001 2 001
5.	Dinas Lingkungan Hidup	SUDARTO NIP. 19700918 200701 1 018
6.	Dinas Perhubungan	ARIF GUNAWAN NIP. 19770103 200701 1 006
7.	Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	ABU SURYANTO, S.H. NIP. 19710208 200701 1 017
8.	Dinas Peternakan dan Perikanan	CHUSNUL KHOTIMAH NIP. 19960809 202204 2 001
9.	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	YENI WINARTI, S.Pd. NIP. 19750125 200701 2 009
10.	Badan Pendapatan Daerah	DWI AGUS PRIYANTO NIP. 19820817 201407 1 004
11.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TITAH CITRA NEGARA, S.E. NIP. 19870123 201101 2 012
12.	Sekretariat Daerah	IMA MEGAWATI NIP. 19801102 200801 2 010

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO